



**Pemimpin Umum:**  
Theo L Sambuaga  
**Wakil Pemimpin Umum:**  
Randolph Latumahina  
**Pemimpin Redaksi:**  
Primus Dorimulu  
**Wakil Pemimpin Redaksi:**  
Petrus Christian Mboek

**Tajuk Rencana**

**Menagih Janji Demokrat**

Hari ini, Partai Demokrat diuji. Sebagai partai politik (parpol) yang sedang berkuasa (*the ruling party*), Demokrat menanggung beban yang lebih berat dibanding parpol koalisi dalam upaya mendukung dan menyukseskan pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Partai yang digagas SBY ini tentu harus seiring sejalan dengan program pemerintah dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pada awal masa pemerintahannya (2004-2009), Presiden SBY dikenal gigih memberantas korupsi. Maklum, penyakit yang satu ini seolah telah mendarah daging pada sebagian pejabat di negeri ini. Bahkan, pada masa pemerintahannya yang kedua (2009-2014), SBY secara khusus membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto yang juga menjabat Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Selain Satgas, sudah ada tiga lembaga yang bertugas memberantas korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua itu menunjukkan keseriusan SBY memberantas korupsi selama masa pemerintahannya. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, SBY tak lupa menggelorakan semangat memberantas korupsi dengan menyebutkan dirinya akan berada di barisan paling depan.

Tak pelak, ketika suap yang berujung pada dugaan korupsi menimpa elite partai, yakni mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, partai berlabang bintang mercy ini harus meresponsnya dengan cepat. Dewan Kehormatan Partai Demokrat akhirnya memutuskan memberhentikan Nazaruddin dari jabatannya di partai. Namun, komisaris beberapa perusahaan yang terjerat kasus suap sesmenpora terkait proyek wisma atlet SEA Games, dugaan suap kepada Sekjen MK Djanedri Gaffar senilai 120.000 dolar Singapura, dan belakangan dituding "bermain" dalam proyek di Kementerian Pendidikan Nasional, masih bisa duduk sebagai wakil rakyat di DPR, sekaligus tetap menjadi kader Partai Demokrat.

Bagi kita, keputusan memberhentikan Nazaruddin dari jabatan bendahara umum tak mampu menjawab keinginan publik yang mengharapkan sanksi yang lebih berat dari itu, seperti pencopotannya dari DPR. Setidaknya Nazaruddin telah melanggar etika politik Partai Demokrat, yaitu bersih, cerdas, dan santun. Bersih yang dimaksud tentu saja tak tersangkut, apalagi menyangkut diri pada kasus korupsi. Dengan hanya mencopotnya dari jabatan bendahara umum, kita menilai Partai Demokrat masih terlalu lembek untuk menegakkan harga diri dan citra partai.

Hal itu diperparah dengan "langkah cepat" Nazaruddin yang meninggalkan Jakarta menuju Singapura sehari sebelum KPK secara resmi meminta Imigrasi mencegahnya ke luar negeri. Selama ini, Singapura dikenal sebagai surga bagi koruptor karena memang tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Negeri Singa itu. Apalagi, Nazaruddin sempat mendapat izin dari pimpinan fraksi untuk berobat di Singapura.

Terkait hal itu, kita menilai secara organisasi, Partai Demokrat memiliki kewajiban moral untuk menghadirkan Nazaruddin yang dipanggil KPK pada Jumat (10/6) dan Senin (13/6). Setidaknya ada tiga alasan yang membuat kita menagih janji Demokrat untuk ikut membantu memulangkan Nazaruddin. *Pertama*, izin yang diberikan fraksi untuk berobat harus bisa dipertanggungjawabkan. Saat izin itu diberikan, media massa telah gencar memberitakan dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus korupsi. Pimpinan fraksi seharusnya menolak permintaan anggotanya dengan alasan sewaktu-waktu bisa dipanggil KPK. Karena izin telah diberikan, pimpinan fraksi memiliki tanggung jawab moral memulangkan Nazaruddin.

*Kedua*, sejumlah petinggi Partai Demokrat telah memberi pernyataan publik tentang keyakinan mereka bahwa kadernya pasti memenuhi panggilan KPK. Bahkan, partai secara khusus mengirim tim untuk berkomunikasi langsung dengan Nazaruddin di Singapura. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, berdasarkan komunikasi dengan tim, Nazaruddin berjanji kembali ke Tanah Air setelah selesai berobat. Sayangnya, tak dijelaskan penyakit apa yang diderita Nazaruddin dan sampai kapan dia menjalani perawatan. *Ketiga*, sebagai kader, Nazaruddin pun berjanji memenuhi panggilan KPK.

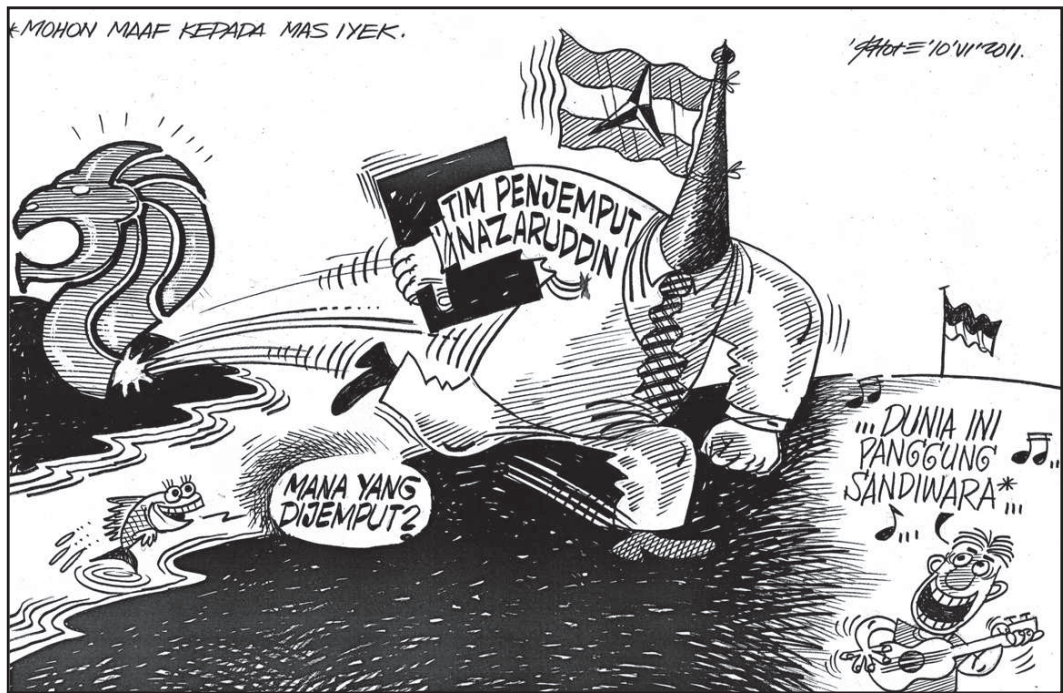
Berdasarkan pengalaman, alasan berobat menjadi tameng bagi koruptor untuk menghindari hukuman. Kita khawatir Nazaruddin menggunakan modus serupa. Apalagi dikabarkannya, keluarganya, termasuk istrinya Neneng Sri Wahyuni, juga berada di sana. Belakangan, Neneng disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi, semakin kuat alasan suami-istri itu untuk tetap tinggal di Singapura.

Untuk itu, kita mendesak Partai Demokrat mendorong Nazaruddin kembali ke Tanah Air. Ini merupakan pertarungan bagi partai yang selama dua pemilu terakhir mendapat kepercayaan rakyat. Citra sebagai partai bersih akan tetap terjaga apabila Nazaruddin datang memenuhi panggilan KPK. Bila sebaliknya, kepercayaan publik terhadap partai ini akan menurun, sekaligus mencoreng wajah SBY yang dikenal gigih memberantas korupsi.

**S A S A R A N**

- Presiden SBY tegaskan, istri dan kedua anaknya tak akan mencalonkan diri di 2014. *- Ceritanya akan lain jika rakyat menghendaki.*
- Nunun Nurbaeti diduga bisa ke Kamboja dari Thailand karena gunakan paspor palsu. *- Tugas aparat kita, bagaimana dia bisa kembali ke Tanah Air.*
- Menurut pengamat, PNS perlu dirasionalisasi karena bekerja hanya 3-4 jam per hari. *- Ingat, pengangguran di negeri ini masih sangat banyak jumlahnya.*

Tulisan opini panjang 900 - 1.000 kata disertai riwayat hidup singkat, foto kopi NPWP, foto diri penulis dikirim ke [opini@suarapembaruan.com](mailto:opini@suarapembaruan.com). Bila setelah dua minggu tidak ada pemberitahuan dari redaksi, penulis berhak mengirim ke media lain.



**Jangan Ulangi Model Berpikir Penjajah**



**AGUS PAKPAHAN**

Setelah diresmikannya Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (RIPPEI) oleh Presiden RI pada 27 Mei 2011, maka dokumen tersebut dapat dicatat sebagai dokumen negara yang berisikan pemikiran pokok bagaimana perekonomian nasional akan dibangun. Tulisan singkat ini ditujukan untuk berbagi pandangan tentang "sejarah" proses pembangunan nasional yang selama ini terjadi. Mengingat apa yang dilakukan ini tergantung dari apa yang dipikirkan, maka model berpikir dipandang sebagai faktor utama dari timbulnya semua hasil dan dampak proses pembangunan itu.

Semua model pembangunan pasti merupakan model untuk mencapai cita-cita dari kekuasaan yang melatarbelakanginya. Model Berpikir Kolonial pasti akan mementingkan dan menguntungkan negara induk daripada kawasan yang dijajahnya. *Pertama*, model pemanfaatan sumberdaya alam disesuaikan dengan permintaan pasar yang menguntungkan pada saat itu, diawali dengan monopoli rempah-rempah (1600an), kemudian Tanam Paksa (1830-1870; kecuali kopi dan tebu sampai 1900an awal), Perkebunan Besar Swasta Asing (Agrarischwet 1870). Model pemanfaatan kehutanan di Jawa juga serupa, khususnya untuk hutan jati—sampai-sampai jati ini dimonopoli Belanda.

Model infrastruktur yang dibangun didasarkan atas kriteria, bangulah infrastruktur yang membuat hasil bumi Nusantara ini secepat-cepatnya sampai di Holland/Pasar Ekspor. Semua kepentingan Belanda didukung juga oleh infrastruktur modern seperti lembaga riset dan pendidikan perkebunan. *Kedua*, urusan pangan pokok seperti padi ditangani sendiri saja oleh rakyat. Baru kemudian menjelang Perang Dunia II, Belanda menjalankan Politik Etik seperti membangun infrastruktur pertanian khususnya irigasi, pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar.

Struktur Ekonomi Dualistik yang masih berlaku hingga sekarang adalah warisan dari landasan berpikir kolonialisme.

**Model Berpikir Orde Lama**

Untuk membangun ekonomi Indonesia, Presiden Soekarno (12 April 1947) membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Mohammad Hatta. Hasilnya adalah "Dasar Pokok Dari Pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia". Atas dasar ini, IJ Kasimo menyusun "Plan Produksi Tiga Tahun RI" (1948-1950); Three Years Production Plan, namely 1948, 1949, and 1950. Kemudian lahir "Rencana Kesejahteraan", Rencana Kesejahteraan Istimewa (1950-1951), sampai dengan karya Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana

(RPNBS) 1961-1969.

Politik ekonomi Orde Lama yang mengagetkan dunia adalah keputusan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing milik Belanda menjadi milik Indonesia pada tahun 1958. Keputusan kebijaksanaan inilah yang melahirkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekarang ini.

Karya Orde Lama yang dampaknya akan mendasar tetapi tidak dilanjutkan implementasinya adalah Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini, mencabut, misalnya "Agrarische Wer" (Staatsblad 1870 No. 55).

Banyak kalangan berpendapat bahwa masalah yang berkaitan dengan sistem agraria dewasa ini merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1960 di atas.

Walaupun Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I disusun belum didasarkan atas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan BAPPENAS sebagai institusi utamanya, Model Berpikir Orde Baru membangun Indonesia berdasarkan komitmen nasional yang disusun atas dasar GBHN dan RPJP. Satu periode RPJP adalah 25 tahun. Pembangunan nasional atas dasar RPJP tersebut diimplementasikan melalui Repelita.

Model Berpikir Orde Baru telah diterapkan selama enam Repelita, yaitu Repelita I (1969/70-1973/74) sampai dengan Repelita VI (1994/95-1998/99). Namun, mengingat kondisi nasional yang terjadi pada tahun 1997 dan pergantian kekuasaan pada tahun 1998, maka Repelita VI tidak dapat diselesaikan.

Perubahan fundamental yang terjadi sebagai implikasi dari Model Berpikir Orde Baru, khususnya yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, kehutanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, model pemikiran mekanistik dan komando menjadi landasan operasional pembangunan pertanian, termasuk pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh petani-petani kecil. Secara teknis hampir semua input produksi terjamin mulai dari air irigasi, pupuk kimia, gudang-gudang logistik hingga penyaluran dan bimbingan massal.

*Kedua*, mengingat landasan pemikirannya mekanistik dan komando maka institusi kemasyarakatan kurang atau bahkan tidak berkembang dengan baik, misalnya demokrasi ekonomi dan institusi koperasi sebagai soko guru struktur ekonomi Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 hingga sekarang belum berkembang.

*Ketiga*, perusahaan swasta besar memperoleh porsi khusus sehingga terwujud perusahaan raksasa swasta tumbuh di bidang perkebunan. Hal ini merupakan implikasi dari Program Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) yang dilahirkan pada era 1980. Di bidang kehutanan, yaitu pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan swasta lahir segera setelah diundangkannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Kita menyaksikan Model Berpikir Orde Baru juga pada akhirnya jatuh dan zaman berganti dengan Orde Reformasi.

Model Berpikir Orde Reformasi dimulai dengan menilai bahwa kesalahan yang terja-

di selama Model Berpikir Orde Baru itu terletak pada UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 langsung diamandemen. Hal tersebut, tentu saja sudah mengubah tatanan dasar sistem politik-ekonomi Indonesia mengingat yang diubah itu adalah konstitusi.

Perubahan mendasar selama Model Berpikir Orde Reformasi, antara lain: Otonomi daerah yang berada pada level kabupaten/kota; Perubahan posisi dan fungsi BAPPENAS dalam penyusunan dan implementasi kebijaksanaan Pembangunan Nasional; Reorganisasi dan pemaknaan kabinet sebagai akibat dari perubahan sistem politik nasional; Kebebasan berpolitik atau berorganisasi.

Nuansa Model Berpikir Orde Reformasi pada prinsipnya adalah kembalinya sistem pembangunan kepada sistem yang dikomando oleh mekanisme politik dengan sistem politik kepartaian (*quasi parlementer*).

**Di Mana Posisi RIPPEI ?**

Dengan latar belakang sejarah perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia sebagaimana secara ringkas diuraikan di atas, mungkin dapat kita ambil beberapa pelajaran penting untuk melihat RIPPEI itu ada pada posisi sejarah yang mana dan apa kiranya dampaknya bagi Indonesia.

Pedoman yang kita pakai tentunya UUD 1945, khususnya Bab Pembukaan, khususnya bahwa: RIPPEI jangan sampai mengulangi kembali model berpikir penjajahan, misalnya apakah sistem pertahanan yang akan dibangun sama seperti dahulu, apakah itu bukan pengulangan *Agrarischwet 1870?* Bukan pengulangan Tanam Paksa?

Apakah RIPPEI memberikan jaminan rakyat dan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan yang abadi mengingat kemerdekaan itu berada di atas segalanya—Negra Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misalnya, petani yang makin menggurem adalah petani yang makin tidak merdeka.

Apakah RIPPEI merupakan kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konsep inti-plasma yang timpang, misalnya, tidak melindungi kaum yang lemah dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apakah RIPPEI didasarkan atas nilai-nilai: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merembaknya konflik lahan diakibatkan oleh diabaikannya nilai-nilai di atas dalam sistem penguasaan lahan.

Berdasarkan pengalaman sejarah panjang Indonesia, maka sudah menjadi semestinya kesalahan-kesalahan pada masa lalu tidak terulang lagi. Kuncinya adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

PENULIS ADALAH PENGAMAT MASALAH EKONOMI POLITIK, MANTAN DEPUTY MENTERI NEGARA BUMN

**Harian Umum Sore**  
**SUARA PEMBARUAN**  
Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

---

**Penerbit:** PT Media Interaksi Utama  
SK Menpen RI Nomor 2245/KEMENPENS/UPPPA/7/1987  
**Presiden Direktur:** Theo L Sambuaga, **Direktur:** Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA  
**Alamat Redaksi:** Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A, Lantai I  
Jl Garnisun Dalam No 8, Karet Semanggi-Jakarta 12930, Telepon (021) 5785 1555, Fax (021) 5785 1554  
**Asisten Redaksi:** Peter F Gontha, **Chief Operating Officer:** Sachin Gopalan, **Director of Digital Media:** John Riady, **General Affairs & Finance Director:** Lukman Djaja, **Circulation & Distribution Director:** Ponti Pandean, **Marketing & Communications Director:** Sari Kusumaningrum.

---

**Dewan Redaksi:** Sabam Siagian (Ketua), James T Riady, Tanri Abeng, Markus Parmadi, Soetniko Soedarjo, Baktinendra Prawiro MS, Dr Anugerah Pekerti, Ir Jonathan L Parapak MS, Bondan Winarno **Penasihat Senior:** Wim Tangkilisan, Samuel Tahir **Redaktur Pelaksana:** Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, **Asisten Redaktur Pelaksana:** Anselmus Bata, Mikko Napitupulu, **Redaktur:** Adrianus Berthus Mandey, Anri Oxler Dengan Patu, Bernardus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono, Marselius Rombe Baan, M Zainuri, Neinsen Rumapea, Paulus C Nitbani, Syariful Mardhy Pasarbu, Surya Lesmana, Yulianto Situmorang, **Asisten Redaktur:** Agustinus Leseq, Alexander Madji, Heri S Soba, Irawati Diah Astuti, Jels Montesori, Marthin Brahmanto, Suredi Tjahja Purnama, Steven Setiabudi Musa, Unggul Wirawan **Staf Redaksi:** Ari Supriyanti Rikin, Charles Ulag, Daurina L Sinurat, Debora MJ Pesik, Dina Manafe, Elvira Anna Siahaan, Endah Dwi Sotiyati, Gardi Gazarin, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Ignatius Liliek, Jeanny Aipassa, Joanto De Saiojao, Kurniadi, Luther Ulag, Lona Olavia, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Utami, Sopianus Edi Hardum, Widi Yulianti, Willy Masaharu, Yereimia Sukoyo, Yumeldasari Chaniago, Dewi Gustiana (Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Epi Helplan (Bogor), Stefy Thenu (Semarang), Teguh Lulus Rachmadi (Surabaya), Aries Sudiono (Malang), Muhammad Hamzah (Banda Aceh), Henry Sittinjak, Arnold H Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis (Palembang), Radesman Saragih (Jambi), Hermansyah Bernani (Bangka), Usmin (Bengkulu), Margaretha Febye Lumanauw (Batam), I Nyoman Mardika (Depasari), Adhie Malehere (Kupang), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Barthelemy B Usin (Palangkaraya), M Kibiat Said (Makassar), Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela (Bandung), Fiska Sani Evari (Yogyakarta), Robert Iidorus Wanvi (Papua), Vony Nyitamahuputti (Ambon), **Pjs Kepala Sekretariat Redaksi:** Rully Satriadi, **Kepala Litbang, Data dan Informasi:** Dhewasari M Wardani, **Koordinator Tata Letak:** Robert Prihatin, **Koordinator Grafis:** Antonius Budi Nurcahyo.

---

**Alamat Iklan:** Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A, Lantai I, Jl Garnisun Dalam No 8, Karet Semanggi-Jakarta 12930, **Rekening:** Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rekening: A/C.115.008600.2559, Bank Ina Perdana, Jl Raya Pasar Minggu No. 2 B-C Rekening No.002.0002.000146, BCA Cabang Millenia Rekening No. 005-34-01411, **General Manager Iklan:** Prasto Prabowo, **Harga Langganan:** Rp 68.000/bulan, Terbit 7 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim. **Alamat Sirkulasi:** Jl Padang No 19-21, Manggarai, Jakarta 12970 Telp: 8280000 ext 108, 140, 142 Faks: 831-0947 **Percetakan:** PT IMWP

<http://www.suarapembaruan.com> e-mail: [koransp@suarapembaruan.com](mailto:koransp@suarapembaruan.com)

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.  
Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dengan hubungan pemberitaan.